

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan perekonomian daerah Riau dilandasi oleh dua pola umum pembangunan yaitu pola umum jangka panjang dan pola umum jangka pendek. Pola umum jangka panjang memuat landasan pembangunan dengan kebijaksanaan ekonomi yang diarahkan kepada dua sektor kunci yaitu sektor pertanian dan sektor industri dengan memperhatikan keterkaitan dengan sektor lain. Secara spesifik arah kebijaksanaan pembangunan daerah Riau masih menitik beratkan pada sektor kunci. Arah pembangunan tersebut adalah untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi regional serta meningkatkan kontribusi dalam pembentukan PDRB Propinsi Riau.

Pembangunan sektor pertanian di daerah Riau sampai saat ini cukup menggembirakan, untuk mendukung sekktor ini pemerintah daerah Riau mencanangkan sasaran pembangunan daerah Riau harus mengacu kepada Lima Pilar Utama, yaitu: 1) pembangunan ekonomi berbasiskan kerakyatan; 2) pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia; 3) pembangunan kesehatan/olahraga; 4) pembangunan/kegiatan seni budaya; dan 5) pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa. Pembangunan ekonomi kerakyatan difokuskan kepada pemberdayaan petani terutama di pedesaan, nelayan, perajin, dan pengusaha industri kecil (Pemda Propinsi Riau, 2000).

Setiap pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu kepada lima pilar utama pembangunan daerah Riau. Karena pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan, khususnya sektor pertanian. Potensi tersebut antara lain: 1) pengembangan tanaman hortikultura; 2) pengembangan tanaman perkebunan; 3) pengembangan usaha perikanan; 4) pengembangan usaha peternakan; 5) pengembangan usaha pertambangan; 6) pengembangan

sektor industri; dan 7) potensi keparawisataan. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.

Untuk pembangunan ekonomi pedesaan pemerintah daerah telah mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan dengan kelapa sawit sebagai komoditi utama. Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit, antara lain: *Pertama*, dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit; *Kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *Ketiga*, dari segi pemasaran hasil produksi daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *Keempat*, daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT), berarti terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan *kelima*, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di daerah Riau karena peranannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Hal ini cukup beralasan karena daerah Riau memang cocok dan potensial untuk pembangunan pertanian perkebunan. Dengan luas mencapai 1.312.661 ha pada akhir tahun 2002, maka pada saat ini daerah Riau mempunyai kebun kelapa sawit terluas di Indonesia. (Dinas Perkebunan Propinsi Riau, 2003). Perkembnagan luas areal kelapa sawit tidak didukung oleh pabrik kelapa sawit (PKS). Akibatnya suplai dari TBS meningkat terutama dari perkebunan rakyat (swadaya). Dari sisi lain sebagian besar produktivitas perkebunan mulai meningkat (kondisi optimum).

Akibat dari ketidak seimbangan suplai TBS dengan ketersediaan PKS di daerah Riau menyebabkan terjadinya distorsi harga pada tingkat petani kelapa sawit. Distorsi harga ini sangat dirasakan oleh petani swadaya, karena mereka tidak mempunyai PKS sebagai penampung TBS mereka. Pada saat harga CPO turun di pasar dunia, harga TBS langsung anjlok pada tingkat petani. Sebaliknya pada saat harga CPO mengalami kenaikan, reaksi kenaikan harga TBS di tingkat petani swadaya begitu lambat. Berbeda dengan TBS yang dihasilkan oleh petani plasma, harganya secara rutin ditinjau setiap dua minggu.

Pada kondisi ini petani tidak dapat berbuat banyak, karena harga ditentukan pihak pembeli (perusahaan inti atau kaki tangan dari perusahaan). Petani menghadapi kekuatan pasar TBS yang monopsonistis/oligopsonistis. Guna memperbaiki struktur pasar tersebut, maka perlu pengembangan PKS di daerah yang berpotensi menghasilkan TBS.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini hanya menganalisis potensi pengembangan industri hilir berbasis kelapa sawit sebagai percepatan pembangunan ekonomi pedesaan daerah Riau. Untuk itu rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Apakah terjadi distorsi harga antara petani kelapa sawit peserta plasma dengan petani kelapa sawit swadaya ?
2. Apakah pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau dapat memperkecil ketimpangan pendapatan antar golongan dalam masyarakat dan disparitas ekonomi antar kabupaten/kota ?
3. Apakah pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat menciptakan *multiplier effect* yang besar di daerah pedesaan?
4. Apakah perkebunan kelapa sawit di daerah Riau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan?
5. Apakah daya dukung wilayah berpotensi untuk pengembangan industri hilir berbasis kelapa sawit di daerah Riau ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Distorsi harga pada tingkat petani, antara petani kelapa sawit peserta plasma dan petani kelapa sawit swadaya.
2. Distribusi pendapatan masyarakat dan disparitas pembangunan antar daerah kabupaten/kota di Riau sebagai akibat dari pembangunan perkebunan kelapa sawit.
3. Besar *multiplier effect* yang diciptakan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan.
4. Daya dukung wilayah terhadap prospek pengembangan industri hilir kelapa sawit di daerah Riau.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk percepatan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan melalui pengembangan industri hilir berbasis kelapa sawit di daerah Riau.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Ditemukan model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan yang berbasis kelapa sawit. Model yang dimaksudkan untuk mencoba menetralkan dikotomi-dikotomi dari pembagian keuntungan yang tidak adil antara petani kelapa sawit (plasma dan swadaya) dengan perusahaan inti.
2. Penyediaan informasi tentang potensi sumberdaya kelapa sawit dan peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan industri hilir terutama di daerah yang berpotensi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan kegiatan-kegiatan atau strategi apa yang mesti ditempuh oleh pemerintah daerah untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit ke depan dan strategi untuk pembangunan ekonomi pedesaan.
4. Semua informasi dari penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pertanian, khususnya dalam ilmu pembangunan pertanian, dimana pemikiran yang tertuang dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

dasar untuk penelitian yang lebih spesifik terutama menyangkut dengan pembangunan ekonomi pedesaan yang berbasis pertanian.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau membawa perubahan besar terhadap keadaan masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat pendatang (transmigrasi), karena program pembangunan perkebunan kelapa sawit pada awalnya dikaitkan dengan program transmigrasi. Akibatnya tingkat pertumbuhan penduduk di daerah Riau menjadi tinggi terutama sekali masyarakat di sektor pertanian. Di samping itu dengan berkembangnya perkebunan kelapa sawit juga merangsang tumbuhnya industri pengolahan yang bahan bakunya dari kelapa sawit. Kondisi ini juga menyebabkan tingginya mobilitas penduduk di daerah Riau terutama di daerah pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini telah memberikan tetesan manfaat (*trickle down effect*), sehingga dapat memperluas daya penyebaran (*power of dispersion*) pada masyarakat sekitarnya. Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit, semakin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan sektor turunannya. Dampak tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat petani, sehingga meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, baik untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit akan menyebabkan adanya keterkaitan pembangunan ke depan dalam bentuk pembangunan industri pengolah hasil (industri hilir) kelapa sawit. Pembangunan industri hilir ini akan mendorong ke arah struktur ekonomi yang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri. Pada dasarnya alasan yang menimbulkan perlunya pembangunan yang seimbang adalah untuk menjaga agar pembangunan tersebut tidak menghadapi hambatan dalam memperoleh bahan baku, tenaga

ahli, listrik, dan fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar. Demikian juga untuk memperoleh pasar dari barang-barang yang diproduksi.

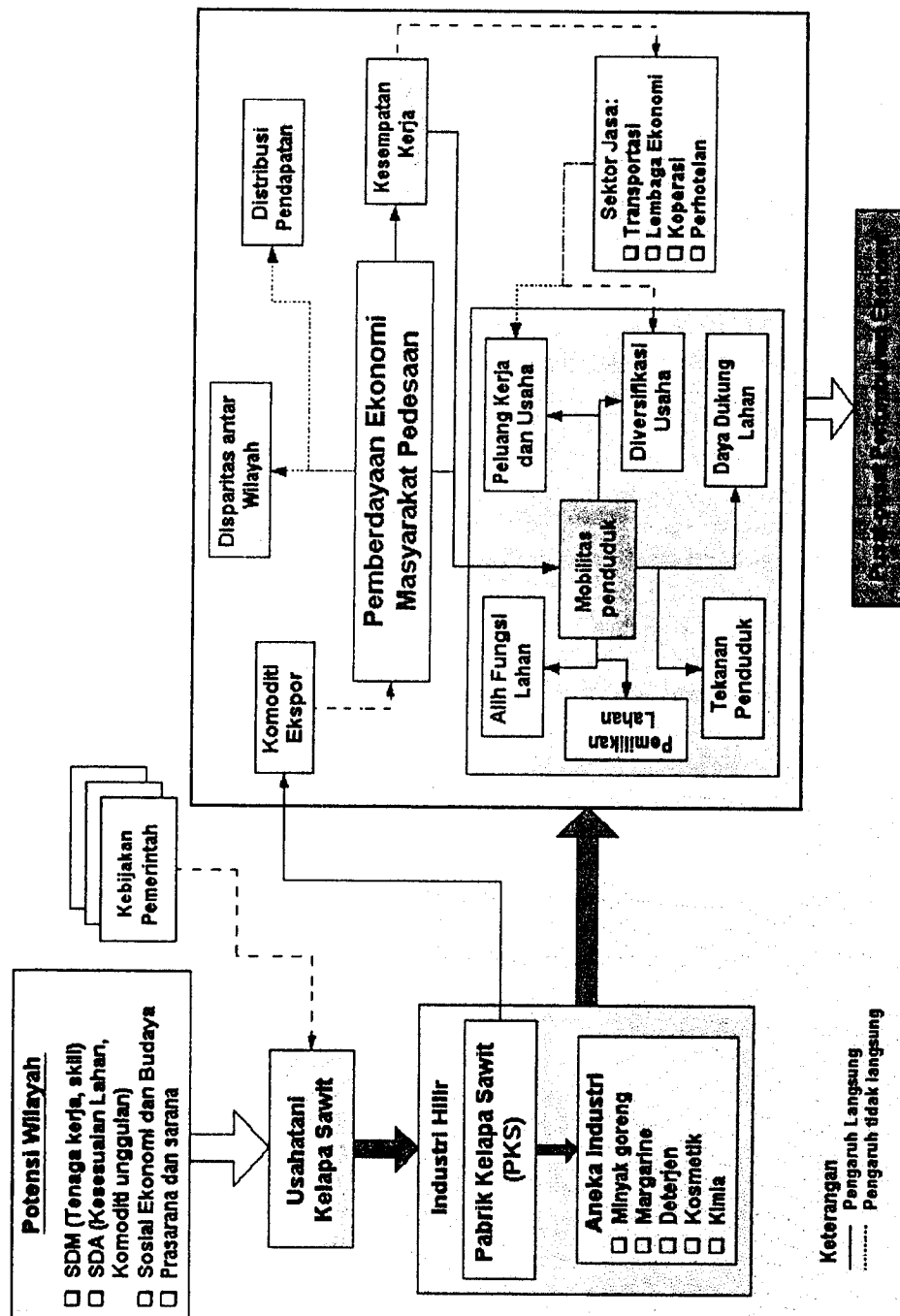
Kelapa sawit mempunyai prospek yang cukup baik untuk masa yang akan datang karena sebagai industri hulu produknya terkait dengan berbagai macam industri hilir. Kelapa sawit mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Sementara saingannya adalah tanaman semusim yang memerlukan perawatan yang intensif. Produktivitas kelapa sawit (produksi/ha) jauh lebih tinggi dari jenis minyak nabati lain. Dengan keunggulan komparatif tersebut maka minyak kelapa sawit mempunyai prospek bagus dalam jangka panjang.

Dalam upaya penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan (*necessary condition*), yang menjamin iklim makro yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian. Untuk penguatan ekonomi rakyat secara riil, diperlukan syarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa pengembangan organisasi bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai ekonomi dalam industrialisasi pertanian (Bungaran Saragih, 2001).

Menurut Bustanil Arifin (2001), potensi subsektor perkebunan untuk dijadikan andalan ekspor di masa-masa mendatang sangat besar. Prasyarat yang diperlukan hanyalah perbaikan dan penyempurnaan iklim usaha dan struktur pasar komoditas perkebunan dari sektor hulu sampai hilir. Mustahil kinerja ekspor akan lebih baik jika kegiatan produksi di sektor hulu, pola perdagangan, dan distribusi komoditas perkebunan domestik masih mengalami banyak hambatan dan distorsi harga.

Ekspor hasil kelapa sawit Indonesia, terutama Riau, sebagian besar masih dalam bentuk CPO. Hal ini sangat berbeda dengan Malaysia dimana lebih dari 90 persen eksportnya dalam berbagai bentuk olahan lebih lanjut dari minyak sawit. Untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan dikembangkan industri hilir berbasis kelapa sawit yang dapat memberikan nilai tambah tinggi terhadap produk yang dihasilkan. Berkembangnya industri hilir ini akan menimbulkan *multiplier effect* ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka secara skematis kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan seperti yang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Daerah Riau

Dari alur kerangka pemikiran tersebut yang akan dijadikan *grand theory* adalah teori basis ekonomi (*economic base*) yang dikembangkan oleh Hoover (1975), Isard (1976), Todaro (1986), Sugeng Budiharsono (1989), Glasson (1990), dan Richardson (2001). Sektor basis adalah kegiatan-kegiatan yang berorientasi ekspor sehingga menyebabkan terjadinya arus dana masuk dari luar wilayah. Jika permintaan terhadap hasil sektor basis meningkat maka usaha-usaha yang mensuplai bahan baku bagi sektor basis tersebut akan ikut berkembang dan dana yang mengalir ke dalam wilayah akan menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa di dalam wilayah, peningkatan pendapatan per kapita, dan penciptaan peluang kerja di daerah tersebut, sehingga secara keseluruhan perekonomian wilayah akan tumbuh.

Teori sektor basis bertujuan untuk menganalisis suatu kegiatan (industri) yang merupakan sektor utama pada suatu wilayah, dimana sektor ini akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian wilayah dan sekitarnya.

1.5.2 Hipotesis

Berdasarkan masalah dan kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas, maka pada penelitian ini akan dilakukan uji hipotesis, yaitu:

Hipotesis 1: Terjadi distorsi harga tandan buah segar (TBS) pada tingkat petani yang mengakibatkan perbedaan pendapatan antara petani plasma dengan petani swadaya.

Hipotesis 2: Pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan di dalam masyarakat, dan mengurangi ketimpangan antar kabupaten/kota.

Hipotesis 3: Pembangunan industri hilir berbasis kelapa sawit menciptakan *multiplier effect* ekonomi yang besar terhadap kegiatan ekonomi pedesaan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Hipotesis 4: Daya dukung Wilayah Riau sangat menopang pengembangan industri hilir kelapa sawit, terutama dalam penyediaan bahan baku.